BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sorong Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong dan memiliki ibu kota di Teminabuan. Aspek Geografis dan Demografis, Luas Wilayah: Sekitar 9.206 km². Jumlah Penduduk: Berdasarkan data Tahun 2022 sebanyak 56.292 jiwa dan data terbaru di pertengahan tahun 2024 sebanyak 55.904 jiwa, jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan terus mengalami pertumbuhan dengan keberagaman etnis dan budaya. Topografi: Wilayah ini terdiri dari dataran rendah, pegunungan, dan daerah pesisir yang berbatasan dengan Laut Seram.Struktur Pemerintahan :Dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Memiliki peran dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan daerah dan Perangkat Daerah: Terdiri dari 29 OPD terbagi atas Dinas, Badan, dan Kantor yang bertanggung jawab atas

pelayanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Tantangan dan Isu Strategis diantaranya Keterbatasan Infrastruktur:

Beberapa daerah masih sulit diakses akibat kondisi geografis yang menantang. Peningkatan Kapasitas SDM: Diperlukan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan. Pengelolaan Keuangan Daerah: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) masih menjadi tantangan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan daerah yang berfungsi untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Sorong Selatan, sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua Barat Daya, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan peningkatan PAD, terutama dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa realisasi penerimaan dari sektor ini masih belum optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan data objek pajak yang akurat, serta masih lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pajak daerah. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara potensi PAD yang seharusnya dapat diperoleh dengan realisasi penerimaan yang terjadi di lapangan. Menurut data dari

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sorong Selatan, capaian PAD dari sektor PBB-P2 dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan dan belum mencapai target yang diharapkan

Tabel 1.1. PAD Pajak Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1	Pajak Hotel	260,000,000	50,000,000	19.23%
2	Pajak Restoran	320,000,000	2,000,000	0.63%
3	Pajak Reklame	300,000,000	18,650,000	6.22%
4	PPJ	800,000,000	18,863,989	2.36%
5	Pajak MBLB	150,000,000	0	0%
6	PBB-P2	500,000,000	53,839,341	10.77%
7	BPHTB	250,000,000	81,167,925	32.47%
Jumlah		**2,580,000,000**	**224,521,255**	**8.70%**

Sumber data ; BPKAD Kabupaten Sorong Selatan

Dengan tabel di atas, kita bisa melihat secara lebih jelas anggaran, realisasi, dan persentase realisasi untuk setiap jenis pajak, serta total keseluruhan. Berikut perhitungan persentase realisasi dari anggaran untuk masing-masing kampung di Distrik Moswaren Tahun 2023:

Tabel 1.2. Pajak PBB-P2 Distrik Moswaren Tahun 2023

NO	Nama Kampung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1	Kampung Moswaren	5,599,418	250,020	4.47%
2	Kampung Kamisabe	833,722	102,089	12.24%
3	Kampung Bumi Ajo	46,708,676	8,533,060	18.27%
4	Kampung Hasik Jaya	45,291,873	5,206,100	11.50%
5	Kampung Tokas	203,796	50,300	24.68%
6	Kampung Johsiro	179,820	0	0.00%
	Jumlah	**98,817,305**	**14,141,569**	**14.31%**

Sumber ; Bapenda Sorong Selatan

Berikut perhitungan persentase realisasi dari anggaran untuk masing-masing kampung di Distrik Moswaren Tahun 2024:

Tabel 1.3. Pajak PBB-P2 Distrik Moswaren Tahun 2024

No	Nama Kampung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Kampung Moswaren	5,599,418	0	0.00%
2	Kampung Kamisabe	833,722	71,000	8.52%
3	Kampung Bumi Ajo	46,708,676	1,037,500	2.22%
4	Kampung Hasik Jaya	45,291,873	2,402,050	5.30%
5	Kampung Tokas	203,796	0	0.00%
6	Kampung Johsiro	179,820	0	0.00%
Jumlah		**98,817,305**	**3,510,550**	**3.55%**

Sumber : Bapenda Sorong Selatan

Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan dari sektor ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan Yusuf and Singgih (2023) menunjukan strategi peningkatan PAD Kabupaten bogor berjalan dengan baik meliputi:

1. Penguatan Edukasi dan sosialisasi Pajak
    a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak melalui media seperti seminar, worshop, media sosial dan website Bappenda
    b. Melakukan edukasi di sekolah-sekolah untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini
2. Optimalisasi layanan wajib pajak
    a. Menyediakan layanan konsultasi pajak yang mudah di akses bagi wajib pajak

b. Mengembangkan system e-tax yang terintegrasi san mudah digunakan untuk pelapor dan pembayar pajak sejak dini
c. Memberikan pelatihan kepada wajib pajak tentang penggunaan system e-tak dan tata cara perpajakan dengan benar

3. Pengembangan system perpajakan
   a. Melakukan digitalisasi data wajib pajak untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan pajak
   b. Membangun basis data terintegrasi dengan pihak terkait untuk mengoptimalkan pengawasan dan penagihan pajak hiburan
4. Pembinaan dan pengawasan wajib pajak
   a. Melakukan pembinaan rutin wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dak akuntabilitas
   b. Melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan
   c. Melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak hiburan yang tidak patuh, seperti sanksi administrative dan pencabutan izin usaha
5. Penegakan hukum perpajakan:
   a. Bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mealkukan penyelidikan dan penuntutan terhadap wajib pajak yang melakukan tindakan pidana perpajakan
   b. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum bagi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Dari lima poin diatas sangat terlihat bagaimana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor membuat regulasi yang begitu terstruktur mulai dari penguatan pemahaman masyarakat terhadap wajib pajak, membuat layanan berbasis digital yang memudahkan membayar pajak, sampai dengan pembinaan dan sanksi. Secara tidak langsung akan membuat masyarakat dengan sendirinya patuh terhadap wajib pajak yang telah dibuat BKD.

Penelitian lain yang mendukung yaitu Ulfa and Aribowo (2021) dengan hasil strategi subdirektorat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM dilakukan salah satunya yaitu dengan penyuluhan subdirektorat berkolaborasi dengan pihak ketiga dalam penyampain materi agar membantu UMKM dapat memahami dan meningkatkan kemampuanya sehingga dapat menaikan omzetnya.

Di sisi lain, strategi yang tepat dalam meningkatkan PAD juga harus mempertimbangkan aspek kebijakan daerah, kapasitas aparatur pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada strategi peningkatan PAD Kabupaten Sorong Selatan dari sektor PBB-P2 di Distrik Moswaren. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fakto penghambat serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pendapatan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan?”

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan utama yang telah diidentifikasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 di Distrik Moswaren.
2. Mengevaluasi efektivitas sistem pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dalam mendukung peningkatan PAD di sektor ini.
3. Mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2 .
4. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan PAD dari sektor PBB-P2 secara efektif dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis
   a. Menambah wawasan dan literatur mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .
   b. Memberikan kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam Bidang Manajemen Keuangan Daerah dan Kebijakan Fiskal Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di wilayah yang memiliki karakteristik serupa.
2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan informasi kepada pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sorong Selatan, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan PAD.
   b. Membantu pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan yang menghambat optimalisasi penerimaan dari sektor PBB-P2 serta menyusun solusi yang tepat.
   c. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan penerimaan pajak daerah yang dapat diterapkan guna mendukung

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan.